

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Ketentuan yang mengatur Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023**

Berdasarkan hasil telaah dan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait pidana mati dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui keberlakuan KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Pembahasan atas pertanyaan pertama berfokus pada dimensi normatif dan substansi pengaturan pidana mati, khususnya melalui identifikasi dan analisis terhadap pasal-pasal yang secara jelas menetapkan kategori kejahatan yang dapat dikenai pidana mati persyaratan penerapannya, serta prosedur pelaksanaannya. Analisis ini sangat penting untuk memahami dasar yuridis pelaksanaan pidana mati setelah diberlakukannya KUHP baru, salah satunya adalah pengaturan baru yang menjadikan hukuman mati sebagai jenis pemidanaan alternatif dengan karakter khusus. Ketentuan ini menunjukkan adanya orientasi yang lebih berperikemanusiaan dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, sembari tetap mempertahankan daya guna hukum dalam menghadapi tindak kejahatan serius.

##### **5.1.2 Aspek Kepastian Hukum Mengenai Pidana Mati Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023**

Aspek kepastian hukum dalam ranah hukuman mati mencakup sejauh mana KUHP 2023 memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas terhadap

penerapan sanksi tersebut. Evaluasi ini melibatkan kemungkinan adanya interpretasi yang beragam terhadap norma hukum, potensi inkonsistensi dalam penerapan, serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi terpidana mati. KUHP 2023 berupaya untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan memperkuat prinsip keadilan melalui mekanisme seperti masa percobaan dan pidana bersyarat. Meskipun demikian, tantangan terhadap kepastian hukum masih muncul, khususnya dalam hal ketentuan teknis, prosedur evaluasi, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan masa percobaan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepastian hukum ini sangat penting untuk melengkapi pemahaman normatif atas pidana mati, dan secara keseluruhan memberikan tinjauan holistik terhadap regulasi dan jaminan perlindungan hukum dalam sistem pemidanaan yang baru di Indonesia.

## **5.2 Saran**

- a. Pihak pemerintah beserta lembaga penegak hukum perlu segera membuat panduan dan memberikan pelatihan tentang penerapan pidana mati dalam KUHP 2023. Ini penting untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam putusan serta proses peradilan
- b. Masyarakat dianjurkan memahami dengan baik ketentuan pidana mati dalam KUHP 2023 dari sumber terpercaya. Pemahaman ini krusial agar dapat berperan aktif mengawasi dan memberi masukan demi terwujudnya sistem peradilan yang transparan dan adil.